



**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SOSIALISASI POLITIK
BAGI PEMILIH PEMULA DI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

Lisa Septiana¹, Mulyana^{2,3}

¹Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

³corresponding author: mulyana@ipdn.ac.id

ABSTRACT

The potential votes of novice voters in the 2024 elections in Cilegon City reach half of the total number of voters in Cilegon City. However, the political orientation of novice voters is not yet clear, so the Cilegon City Regional General Election Commission conducts political socialization for novice voters. This study aims to analyze the role of the Regional General Election Commission in providing political socialization for novice voters in Cilegon City, Banten Province. The research method is descriptive qualitative. Data collection used is by interview and documentation then using data analysis techniques data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study state that in general the role of the Cilegon City General Election Commission in carrying out political socialization for novice voters in preparation for the presidential and regional head general elections in 2024/2025 has been carried out, namely through the implementation of socialization to schools as well as through social media and local radio. However, there are still many shortcomings such as the non-implementation of socialization for all existing schools due to the termination of the face-to-face socialization program due to the Covid-19 pandemic and the still not optimal implementation of online socialization. Based on the results of this study, there needs to be special attention from the General Election Commission to novice voters to provide political socialization related to the upcoming Presidential Election so that novice voters can participate correctly and produce a quality Presidential Election.

Keywords: *Role; General Election Commission; Socialization; Novice Voters.*



ABSTRAK

Potensi suara pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kota Cilegon mencapai setengahnya dari jumlah keseluruhan pemilih di Kota Cilegon. Namun, orientasi politik pemilih pemula belum jelas sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cilegon melakukan sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Cilegon Provinsi Banten. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi kemudian menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara umum peran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula untuk persiapan pemilihan umum presiden dan kepala daerah pada tahun 2024/2025 telah dilaksanakan yaitu melalui pelaksanaan sosialisasi ke sekolah maupun melalui media sosial dan radio lokal. Namun masih banyak kekurangan seperti belum terlaksananya sosialisasi bagi seluruh sekolah yang ada karena dihentikannya program sosialisasi secara tatap muka akibat dari pandemi Covid-19 serta masih belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi secara daring. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu ada perhatian khusus dari Komisi Pemilihan Umum kepada para pemilih pemula untuk memberikan sosialisasi politik terkait dengan Pemilihan Presiden yang akan datang agar pemilih pemula dapat berpartisipasi secara benar dan menghasilkan Pilpres yang berkualitas.

Kata Kunci: Peran; Komisi Pemilihan Umum; Sosialisasi; Pemilih pemula.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum memiliki esensi sebagai wahana demokrasi untuk menciptakan sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir berdasarkan kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Jika dilihat dari segi demokrasi, tujuan pemilu harus kembali berpedoman pada prinsip kebijaksanaan yang demokratis yaitu mengutamakan kepentingan semua golongan masyarakat. Tujuan pemilu secara sederhana adalah sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan subjek politik yang aktif dalam menentukan keberhasilan proses pemilu. Dalam hal ini di lingkungan masyarakat perlu diselenggarakannya sosialisasi pemilihan untuk meningkatkan kesadaran berpolitik bagi pemilih dalam pemilihan. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan.

Sosialisasi merupakan bagian terpenting dari proses persiapan pemilu. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan partai politik berperan dalam memberikan sosialisasi. Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum secara khusus sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa sasaran sosialisasi pemilihan, meliputi komponen:

1. Keluarga;
2. Pemilih pemula;
3. Pemilih muda;
4. Pemilih perempuan;
5. Pemilih penyandang disabilitas;
6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. Kaum marjinal;
8. Komunitas;
9. Keagamaan;
10. Relawan demokrasi;
11. Warga internet.

Penelitian ini terfokus dalam sosialisasi pada pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula yaitu masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat memilih bisa dilihat dari peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (5) mengatakan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih”. Pemilih pemula memiliki peranan yang sangat penting. Seperti yang tercatat dalam website resmi Badan Statistik Sosial (BPS) Provinsi

Banten dan tercantum dalam tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Data Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Banten

Kelompok Umur Penduduk	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
0-4	534643	533354	534286	509014	507680	508668	1043657	1041034	1042954
5-9	535170	536208	537482	510429	512394	513892	1045599	1048602	1051374
10-14	517080	518062	521873	485428	487610	493019	1002508	1005672	1014892
15-19	519916	516118	514560	489235	485491	483802	1009151	1001609	998362
20-24	538182	535749	533229	510711	508800	506650	1048893	1044549	1039879
25-29	532244	532815	535607	509196	510120	513306	1041440	1042935	1048913
30-34	524957	529510	533687	508073	510180	512303	1033030	1039690	1045990
35-39	493128	499873	508642	480135	485247	492244	973263	985120	1000886
40-44	455088	462828	471074	446577	453836	461155	901665	916664	932229
45-49	398201	408769	420267	389864	400857	412621	788065	809626	832888
50-54	330881	341701	353712	319612	331674	344935	650493	673375	698647
55-59	263483	274277	285423	252441	264418	276555	515924	538695	561978
60-64	190527	200711	212189	179087	190415	203279	369614	391126	415468
65-69	128917	138223	146589	122137	131420	140202	251054	269643	286791
70-74	56034	65476	76526	60347	68946	79067	116381	134422	155593
75+	51820	53470	55895	62005	65243	69246	113825	118713	125141

Sumber: <https://banten.bps.go.id/>

Merujuk tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 17 sampai 21 tahun pada tahun 2020 s.d. 2022, menunjukkan angka yang menjadi potensi suara pemilih pemula pada pemilu 2024. Dengan demikian, jumlah pemilih pemula menjadi sangat signifikan, diharapkan agar masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dengan bijak. Partai politik juga berfokus pada pemilih pemula karena jumlahnya mencapai setengah dari total pemilih dan kecenderungan politik pemilih pemula masih ambigu, sehingga rentan terhadap pengaruh. Untuk mencegah hal tersebut maka pemilih pemula perlu diberikan sosialisasi politik yang memadai, karena jika pemilih pemula tidak memiliki pendidikan politik yang cukup maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas politik pemilih pemula, yang akan berdampak pula pada rendahnya kualitas pemilu. Padahal masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada pendidikan dan

pembekalan mengenai kecerdasan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi politik. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 3 disebutkan bahwa: Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:

- Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan dan
- Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Sosialisasi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik kepada masyarakat dengan harapan masyarakat lebih mengerti bagaimana berpartisipasi yang baik dan positif dalam pemilu. Dilansir dalam Website

AntaraneWS, bahwa meski pelaksanaan pemilihan umum 2024 masih cukup lama, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon mulai melakukan persiapan, persiapan yang dilakukan sebagai persiapan untuk mendukung kelancaran sejumlah tahapan panjang yang akan dilalui karena melibatkan sejumlah instansi pemerintah daerah dalam penanganannya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Irfan Alfi, Selasa (01/06), menyebutkan pihaknya sudah mulai aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan persiapan dan konsentrasi terhadap program peningkatan peduli pemilih, demi kelancaran dan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2024 mendatang (Hayati, 2021). Salah satunya yaitu program sosialisasi politik. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat mengalami peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pemilih pemula dalam menggunakan haknya dan berpartisipasi aktif dan positif dalam pemilu.

Menurut Sitepu (2012). Pendekatan Sosiologis yang lebih berpengaruh dalam mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan memilih dalam konteks sosial. Menyikapi kondisi saat ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah juga harus memahami dan belajar hal-hal baru yang berkembang dalam masyarakat sehingga dalam memberikan sosialisasi dapat mencapai tujuannya. Untuk mewujudkan strategi salah satu agenda Komisi Pemilihan Umum dalam target sosialisasi pada pemilih pemula dimana 30% dari total penduduk Indonesia adalah pemilih pemula. Salah satu program Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada pemilih pemula yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang politik kepada pemilih pemula. Merujuk pada informasi awal yang diperoleh peneliti di lapangan,

permasalahan yang terjadi sebelumnya dalam menyelenggarakan program sosialisasi politik diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya waktu yang di miliki Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon.
2. Minimnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon.
3. Kurangnya tenaga kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam melakukan sosialisasi politik di Kota Cilegon.
4. Banyaknya lokasi sasaran sosialisasi politik di Kota Cilegon yang terdiri dari 39 Sekolah Menengah Atas dan 12 Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Sarana dan prasarana kegiatan sosialisasi politik yang belum memadai di Kota Cilegon.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rismawati & Mardiana (2018), bertujuan untuk menganalisis peran KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pendidikan politik. Sementara itu, Hemas (2015) menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemula pada Pilkada tahun 2015 dan mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2020) menemukan bahwa faktor yang menjadi penghambat ketidak ikut sertaan dalam partisipasi politik yaitu kesibukan sehari-hari dan pengaruh dari lingkungan keluarga.

Merujuk pada uraian di atas, maka penulis dapat menyatakan bahwa

penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Cilegon Provinsi Banten. Apabila penelitian sebelumnya mengkaji tentang bentuk program pendidikan politik Hemas (2015), sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada peran KPU dalam sosialisasi politik. Penulis menganalisis peran KPUD menggunakan teori peran Sutarto (2009).

KAJIAN TEORI

Sutarto (2009) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari 3 komponen, yaitu sebagai berikut:

1. Konsepsi peran
Konsepsi peran adalah suatu kepercayaan seseorang mengenai apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran
Harapan peran merupakan harapan orang lain kepada seseorang yang menduduki posisi tertentu tentang bagaimana seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran
Pelaksanaan peran yaitu tingkah laku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu jabatan tertentu.

Peranan menurut Ahmadi (1982), “merupakan suatu pengharapan manusia terhadap cara individu bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya”. Berdasarkan pengertian peran dari para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa kata peran mengandung arti yaitu seseorang yang memiliki jabatan dalam struktur sosial kemudian melaksanakan

tugas atau fungsi dari jabatan tersebut bisa dikatakan menjalankan perannya.

Sementara itu Michael Rush dan Philip Althoff dalam Sahid (2011) menyatakan, ada beberapa segi penting dari sosialisasi.

1. Pada dasarnya, sosialisasi adalah proses pembelajaran, khususnya pembelajaran dari pengalaman individu.
2. Hasil dari pembelajaran tersebut meliputi perilaku individu yang melibatkan berbagai aspek, terutama pengetahuan, model-model, nilai, dan sikap. Perilaku ini tidak hanya terbatas pada individu saja, melainkan juga mencakup perilaku kelompok di mana individu tersebut terlibat.
3. Sosialisasi tidak terbatas pada masa anak-anak hingga remaja, melainkan berlangsung sepanjang hidup.
4. Sosialisasi merupakan kondisi awal yang diperlukan untuk aktivitas sosial dan secara langsung atau tidak langsung memberikan pemahaman tentang perilaku sosial.

Selain itu Rush dan Althoff dalam Sahid (2011) juga berpendapat bahwa ada tiga cara untuk melakukan sosialisasi yaitu imitasi, instruksi dan motivasi. Dengan cara imitasi, seseorang meniru tingkah laku individu lainnya, sedangkan dengan cara instruksi, seseorang diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya didalam sistem politik dan apa yang harus dikerjakan. Terakhir yaitu dengan cara motivasi, dimana individu belajar langsung dari pengalaman, atau membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan orang lain. Menurut Almond dalam Sahid (2011), ada dua hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam proses sosialisasi.

1. Proses sosialisasi terjadi terus-menerus sepanjang kehidupan seseorang. Pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang terbentuk pada masa anak-anak dapat terus berubah dan berkembang seiring dengan perolehan pengetahuan dan pengalaman yang terjadi sepanjang hidupnya.
2. Sosialisasi dapat termanifestasi dalam bentuk transmisi dan pengajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika sosialisasi melibatkan komunikasi informasi, nilai, dan kepekaan politik secara langsung, maka jenis sosialisasi ini bersifat langsung.

Sosialisasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Jika suatu sosialisasi gagal dalam mempengaruhi tingkah laku masyarakat, maka segala kegiatan yang telah diambil dan membutuhkan dukungan dari masyarakat itu sendiri secara langsung akan gagal. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa indikator keberhasilan dari suatu sosialisasi dapat diukur apabila masyarakat dapat memahami isi dari sosialisasi tersebut baik dalam bentuk penambahan pengetahuan, nilai-nilai, dan tingkah laku masyarakat tersebut.

Surbakti (2010) menyatakan ada tiga hal yang menjadi tujuan dari pemilihan umum, yaitu:

1. Sebagai langkah untuk memilih para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan, meskipun dilaksanakan melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme penyeleksian, pendelegasian, atau

penyerahan kedaulatan kepada individu atau partai yang dipercayakan. Pemilihan umum biasanya melibatkan pertimbangan prinsipil dalam menentukan alternatif kebijakan pemerintah, dan seringkali rakyat diminta untuk menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan yang diajukan pemerintah. Jika pemilihan umum digunakan untuk menetapkan kebijakan fundamental ini, disebut sebagai referendum.

2. Pemilihan umum juga dapat dianggap sebagai mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai-partai yang memenangkan kursi, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Pemikiran ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda, tetapi kadang-kadang saling bertentangan. Dalam sistem demokrasi, perbedaan atau pertentangan kepentingan diatasi melalui musyawarah, bukan kekerasan.
3. Pemilihan umum menjadi sarana untuk memobilisasi dan/atau menggalang dukungan masyarakat terhadap negara dan pemerintah dengan ikut serta dalam proses politik. Selain itu, tujuannya adalah untuk meyakinkan dan melibatkan anggota masyarakat dalam proses politik, mengingat semakin berkurangnya semangat dan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum merupakan suatu wadah untuk mengumpulkan suara sebagai simbol dukungan masyarakat terhadap wakil-wakil rakyat dan sebagai bentuk partisipasi dalam proses politik. Sementara itu definisi pemilih secara umum oleh Firmansyah (2007) diartikan sebagai, semua pihak sebagai tujuan utama para kontestan untuk dipengaruhi dan diyakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen ataupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Sedangkan kelompok masyarakat sebagai para pendukung kandidat-kandidat di lingkungan eksternal.

Pemilih pemula adalah kelompok masyarakat yang berusia 17 sampai 21 tahun yang baru akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali, atau dapat dikatakan berasal dari kalangan remaja baik yang masih duduk dibangku sekolah maupun yang sudah menikah. Dengan adanya hak pilih yang mereka miliki, maka kalangan remaja tersebut telah memiliki kewajiban serta tanggung jawab yang sama dengan orang dewasa karena masih sangat baru dalam hal penyelenggaraan pemilu, mulai dari tujuan, mekanisme, serta pengaruh suara yang mereka berikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan perilaku pemilih ini menjelaskan mengapa para pemilih memilih partai A bukan memilih partai B atau yang lainnya. Maka dari itu, ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk memahami perilaku pemilih tersebut, yaitu *party identification model*, *sociological model*, dan *rational choice model* (Sitepu, 2012).

1. *party identification model* adalah teori yang berfokus pada perasaan psikologis yang terikat dengan partai politik. Dengan kata lain, secara psikologis, seseorang mengidentifikasi dirinya dengan partai tertentu. Konsep ini menekankan persepsi pemilih terhadap keterkaitan emosional dengan partai politik yang spesifik.
2. *sociological model* lebih berfokus pada analisis sistem sosial atau stratifikasi sosial, seperti kelompok usia dan status sosial, yang diyakini memengaruhi perilaku pemilih. Preferensi pemilih dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografis dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, jenis pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, pendapatan, dan agama.
3. *rational choice model* melihat kegiatan memilih sebagai hasil dari kalkulasi untung-rugi, yang melibatkan pertimbangan tidak hanya biaya memilih tetapi juga potensi suara yang dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, serta sebagai alternatif terhadap pilihan yang ada. Perhitungan untung-rugi secara pribadi digunakan oleh pemilih untuk membuat keputusan tentang partai politik atau kandidat yang akan dipilih, terutama dalam menentukan apakah akan ikut memilih atau tidak.

METODE

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari s.d Februari 2022 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun informan penelitian adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dan Pemilih Pemula/Pemilih Sekolah Menengah Atas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun model wawancara yang peneliti gunakan yaitu model wawancara semi berstruktur. Observasi dilakukan dengan mengamati peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Cilegon. Dalam melakukan analisis secara kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman (1984) yang mengatakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah penuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula

Peneliti menganalisa peran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dengan menggunakan teori Peran Sutarto (2009) yang berkaitan dengan konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran.

Konsepsi Peran

Salah satu syarat utama bagi keberhasilan peran adalah terlaksananya tugas dan wewenang yang ditunjukkan dari kinerja, memiliki rasa tanggungjawab atas tugasnya adalah suatu hal yang wajib.

Dibawah ini adalah indikator yang telah diamati melalui wawancara. KPU Kota Cilegon merupakan salah satu KPU di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan program sosialisasi politik. Ada beberapa alasan tertentu yang diungkapkan oleh KPU Kota Cilegon dalam melaksanakan sosialisasi politik. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 Januari 2022. Latar belakang KPU Kota Cilegon melakukan sosialisasi politik sendiri menurut AC yaitu: “KPU melaksanakan sosialisasi politik karena itu sudah merupakan tugas dan kewajiban yang tertera dalam undang-undang maupun peraturan KPU, yaitu tugas untuk melaksanakan sosialisasi salah satunya kepada pemilih pemula. Sehingga sosialisasi politik itu adalah bagian tersendiri dari program KPU.” Pemilih pemula dengan jumlah yang mendominasi dalam Warga Negara Indonesia jangan sampai menjadi sosok yang apatis dan tidak ikutserta dalam pemilihan umum. Namun pemilih harus diarahkan menjadi pemilih yang cerdas dan memilih berdasarkan visi dan misi, dalam buku panduan pemilih pemula disebutkan bahwa tujuan dari program sosialisasi politik ini yaitu karena kebutuhan akan diadakannya sosialisasi politik yang bersifat terus-menerus.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai, dalam hal ini KPU mempunyai target dalam sosialisasi politik. Dalam wawancara, EM (Komisioner) menyatakan bahwa: “pemilih pemula dijadikan target utama dalam sosialisasi politik karena selain jumlahnya yang mendominasi, sosialisasi kepada pemilih pemula ini lebih mudah disampaikan dan kemudian dipahami oleh mereka dibanding subjek lainnya seperti kepada penyandang disabilitas atau kepada hanya pemilih perempuan”. Pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemilih pemula merupakan target utama dalam sosialisasi politik karena jumlahnya

mencapai 1/3 dari jumlah peserta partisipasi politik, selain itu sebenarnya pemilih pemula ini rentan terpengaruh oleh lingkungannya terkait dengan politik, seperti memilih calon Presiden.

Harapan Peran

Sosialisasi politik pastinya membawa pengaruh yang sangat besar bagi tingkat partisipasi politik dalam Pemilihan Umum, bagaimana pengaruhnya bagi pemilih pemula, peneliti telah mewawancarai salah satu Komisioner KPU Kota Cilegon menyatakan: “sosialisasi politik yang dimaksud ini kan berupa pendidikan politik, kalo berbicara mengenai pengaruhnya terhadap potensi bagi pemilih pemula itu pasti sudah sering terlihat, dengan dilaksanakannya sosialisasi politik ini membuat partisipasi politik dari pemilih pemula meningkat dalam Pemilihan Umum.” Pendapat di atas meyakini peneliti bahwa apabila tidak dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini, maka pemilih pemula tidak akan terbuka pikirannya dalam melaksanakan haknya dalam pemungutan suara Pemilu.

Untuk mengukur sejauh mana tingkat kepaahaman pemilih pemula pada materi yang disampaikan ketika dilaksanakannya sosialisasi politik. Penulis berkunjung ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Cilegon dan melakukan wawancara kepada tiga orang siswa. Yang pertama bernama Aji, ia mengatakan “saya lupa-lupa ingat materi apa yang disampaikan, karena tidak pernah ada lagi kegiatan sosialisasi politik yang diselenggarakan, terakhir itu pada saat saya kelas 1 SMA yaitu tahun 2019”. Selanjutnya, informan lain juga mengungkapkan: “terakhir sosialisasi dilakukan pada tahun 2019, mungkin itu untuk persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 lalu, kalo untuk persiapan Pilpres 2024 yang akan datang, belum ada tuh sosialisasi lagi dari KPU di sekolah ini”. Wawancara di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD masih sangat jauh dari harapan. Selain frekuensi yang sangat rendah yaitu hanya satu kali, 2 tahun terakhir ini kegiatan tersebut tidak dijalankan lagi karena adanya pandemi Covid-19. Namun, pada dasarnya para pemilih pemula telah mengetahui bahwa menggunakan hak suaranya dalam Pemilu adalah hak sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua Warga Negara Indonesia. Namun demikian para pemilih pemula di Kota Cilegon memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat rendah, mereka masih menganggap kegiatan politik terutama Pemilu merupakan kegiatan yang tidak terlalu penting karena sebagian besar pemilih pemula melakukan Pemilihan hanya untuk formalitas saja dan memilih berdasarkan anjuran orang tua, hal itu disebabkan para pemilih pemula tidak tahu latar belakang maupun profil dari calon-calon Kepala Daerah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik yang dimiliki oleh para pemilih pemula masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi apalagi selama pemulihan pasca pandemi covid-19 ini. Dengan semakin baiknya pemahaman para pemilih pemula maka semakin baik pula tingkat kualitas Pemilu yang nanti akan diselenggarakan.

Lebih lanjut penulis mengkaji tentang efektivitas sosialisasi politik bagi pemilih pemula dalam persiapan Pemilu 2024. Indikator ini akan menelusuri lebih dalam bagaimana pelaksanaan sosialisasi. Peneliti mewawancarai langsung Sekretaris KPU Kota Cilegon mengungkapkan:

“sebenarnya kalo berbicara sudah efektif atau belum, jujur masih jauh dari kata efektif, karena setelah dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 kemarin, kami KPU Kota Cilegon belum menyelenggarakan ataupun merencanakan kembali sosialisasi

politik ke sekolah-sekolah, ya paling sosialisasi yang saat ini bisa dilakukan hanya dari sosial media dan podcast saja, karena melihat kebijakan terkait pandemi ini yang melarang adanya perkumpulan”.

Berdasarkan wawancara di atas dan juga didukung oleh wawancara yang penulis lakukan kepada informan lainnya, maka dapat diketahui informasi bahwa peran KPU Kota Cilegon masih belum baik, karena berdasarkan hasil pengamatan saat penelitian ini dilakukan. pada media sosial yaitu instagram yang dimiliki KPU Kota Cilegon dengan akun yang bernama *kpukotacilegon_officials* belum melakukan penyampaian materi tentang sosialisasi politik padahal ini sudah memasuki tahun kedua untuk persiapan Pemilu 2024.

Pelaksanaan Peran

Salah satu bentuk sosialisasi politik yang biasa dilakukan oleh KPUD Kota Cilegon adalah dengan memberikan pemahaman politik tentang Pilpres. Menurut wawancara kepada L.

(Komisioner KPU Kota Cilegon), beliau menyatakan:

“sosialisasi kepada pemilih pemula dilakukan dengan mendatangi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat yang ada di Kota Cilegon. Dalam hal ini KPU Kota Cilegon mengintruksikan kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk bekerjasama dengan sekolah-sekolah SLTA sederajat di masing-masing kecamatan melakukan sosialisasi terhadap pelajar tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada, kegiatan ini dilakukan dengan menjadi pembina upacara bendera pada hari senin ataupun langsung mendatangi kelas sekolah untuk menyampaikan sosialisasi Pemilu”.

Data jumlah partisipasi masyarakat pada pemilu sebelumnya sangat dibutuhkan untuk menjadi perbandingan kualitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cilegon. Berikut tabel datanya:

Tabel 2. Data Partisipasi Pemilihan Umum di Kota Cilegon

No.	Pemilihan	Tahun	Presentase
1.	Walikota dan Wakil Walikota	2005	77,33%
2.	Gubernur dan Wakil Gubernur	2006	69,90%
3.	Walikota dan Wakil Walikota	2010	75,71%
4.	Gubernur dan Wakil Gubernur	2011	68,44%
5.	Walikota dan Wakil Walikota	2015	63,51%
6.	Gubernur dan Wakil Gubernur	2017	68, 09%
7.	Pilpres	2019	82%
8.	DPR RI (DAPIL II)	2019	90,14%
9.	DPD RI	2019	90,15%
10.	DPRD Banten	2019	90,07%
11.	DPRD Cilegon	2019	90,02%
12.	Walikota dan Wakil Walikota	2020	77,11%

Sumber: KPU Kota Cilegon

Tabel 2. menunjukkan bahwa partisipasi pemilu pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan tidak berjalannya program peningkatan partisipasi politik yang diselenggarakan oleh KPU Kota Cilegon, salah satunya sosialisasi politik kepada

pemilih pemula. Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada uraian sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon melakukan survey ke kecamatan yang ada di Kota Cilegon mengenai potensi pemilih baru untuk Pemilu yang akan datang, berikut tabel yang data yang diperoleh:

Tabel 3. Jumlah Potensi Pemilih Baru Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2021

No.	Kecamatan	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Cibeber	17 Tahun	583	611	1,194
2.	Cilegon	17 Tahun	397	366	763
3.	Citangkil	17 Tahun	731	693	1,424
4.	Ciwandan	17 Tahun	446	430	876
5.	Gerogol	17 Tahun	631	448	879
6.	Pulomerak	17 Tahun	522	501	1,023
7.	Jombang	17 Tahun	652	587	1,239
8.	Purwakarta	17 Tahun	375	378	753
Jumlah			4,137	4,014	8,151

Sumber: KPU Kota Cilegon

Tabel 3. dibuat dengan tujuan untuk melihat sasaran sosialisasi politik yang akan diselenggarakan di hari kedepannya agar hasilnya nanti tidak jauh dengan target yang ada, harapannya yaitu jumlah partisipasi politik pada pemilu yang akan datang nanti dapat meningkat secara signifikan. Selain dari indikator-indikator di atas yaitu berdasarkan hasil pengamatan peneliti, diketahui bahwa KPU Kota Cilegon belum melaksanakan sosialisasi politik secara merata kepada para pemilih pemula. Apabila ada, sosialisasi juga selalu hanya terpusat pada Kecamatan Cilegon dimana merupakan tempat kantor KPU Kota Cilegon berdiri, sosialisasi hanya dilakukan di sekitar daerah tersebut yaitu di SMA Negeri 1 Cilegon pada tahun 2019 silam. Hal ini menyebabkan pemahaman para pemilih pemula tentang pendidikan politik masih minim apalagi untuk persiapan Pilpres dan Pilkada 2024/2025. Padahal sudah sangat jelas disebutkan dalam misi KPU Kota Cilegon Nomor 4 dan Peraturan KPU

Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) huruf a bahwa sasaran sosialisasi pemilihan itu meliputi komponen: Keluarga; Pemilih pemula; Pemilih muda; Pemilih perempuan; Pemilih penyandang disabilitas; Pemilih berkebutuhan khusus; Kaum marjinal; Komunitas; Keagamaan; Relawan demokrasi; Warga internet. Dari sekian banyak komponen tersebut, untuk pemilih pemula saja KPU Kota Cilegon belum maksimal dalam melaksanakan sosialisasi apalagi untuk pelaksanaan seluruhnya. Luxsma (Komisioner KPU Kota Cilegon) menyebutkan alasannya, “karena tahun 2021 pandemi dan sebagian kerja kami wfh serta belum memasuki tahapan pemilu.” Memang dari alasan tersebut menjadikan pihak KPU Kota Cilegon tidak bisa dikatakan mempunyai peran yang buruk, karena apabila dipaksakan untuk membuat perkumpulan demi kegiatan sosialisais politik ini juga akan menjadi hal yang menyimpang dari peraturan PPKM yang ada. Oleh karena itu, KPU Kota Cilegon menggantinya

dengan sosialisasi secara daring. Sosialisasi yang dilakukan KPU melalui media sosial juga tidak mengarah ke satu komponen saja tetapi ke semua komponen yang membuat sosialisasi ini menjadi tidak efektif, karena media sosial maupun radio lokal biasanya menyampaikan informasi hanya satu arah saja. Selain itu, media sosial juga tidak bisa mengukur sejauh mana ke pemahaman peserta sosialisasi tentang pemilihan umum.

2. Diskusi

Merujuk hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa KPU memiliki peran penting dalam menyelenggarakan sosialisasi politik kepada pemilih pemula di Kota Cilegon. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk mengefektifkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan, maka KPU Kota Cilegon dinilai dapat melakukan beberapa hal diantaranya:

1. Menyelenggarakan sosialisasi secara daring (online) dengan intensitas yang lebih sering.
2. Mengemas materi daring yang disampaikan semenarik mungkin agar peserta tidak jenuh.
3. Menyusun teknik kegiatan sosialisasi daring (online) dengan menarik seperti adanya ice breaking dan quiz berhadiah di akhir penyampaian materi.
4. Melakukan sosialisasi media seperti podcast di radio lokal, dan konsisten menyampaikan informasi kepemiluan di platform media sosial.

Peneliti juga berpendapat bahwa KPU Kota Cilegon dapat melakukan sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan serta dapat dilakukan secara komprehensif menjangkau seluruh sekolah di Kota Cilegon khususnya bagi pemilih pemula tersebut. Mengingat, saat penelitian ini dilakukan, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPUD sendiri akhir-

akhir ini baru satu kali yaitu di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cilegon. Hal ini sangat disayangkan mengingat masih banyak sekolah yang belum sempat mengikuti kegiatan sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon juga mengusahakan tetap melaksanakan sosialisasi politik secara tatap muka apabila pandemi Covid-19 berada pada kebijakan PPKM level 2, pada kebijakan tersebut sudah diperbolehkan untuk tatap muka namun tetap memperhatikan jarak dan jumlah maksimal dalam ruangan.

Selama melaksanakan penelitian tentang peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cilegon dalam pelaksanaan sosialisasi politik bagi pemilih pemula, peneliti mendapati bahwa dalam pelaksanaan peran tersebut tidaklah mudah. Terdapat beberapa aspek yang menjadi hambatan program sosialisasi bagi pemilih pemula, diantaranya adalah banyaknya Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Cilegon tidak seimbang dengan jumlah komisioner yang bekerja di kantor KPU Kota Cilegon, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini sangat memotong waktu untuk melakukan persiapan jelang Pemilu 2024 salah satunya yaitu menjalankan pendidikan politik ke sekolah-sekolah ini. Salah seorang Komisioner menyatakan hambatan yang biasa dialami yaitu: “yang pertama kendala pada pemilih pemula yang keberadaannya di pesantren, yang kedua pelajar (pemilih pemula) belum mengerti mekanisme cara perekaman KTP-Elektronik, kemudian yang ketiga kurangnya kesadaran pemilih pemula yang enggan melakukan Rekam e- KTP”. E.M. juga menyatakan bahwa: faktor-faktor penghambat untuk sosialisasi politik langsung ke sekolah-sekolah saat ini ya karena: Kondisi pandemi saat ini, pembatasan tatap muka, sehingga secara daring (online) yang outputnya tidak semaksimal apabila dilakukan secara luring (tatap muka). Kondisi di sekolah dan universitas yang menerapkan *Work*

From Home (WFH)/belajar online pada murid dan mahasiswa sehingga fasilitas untuk kegiatan sosialisasi terhambat”.

Peningkatan partisipasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum juga tidak hanya sosialisasi kepada pemilih pemula, melainkan sosialisasi yang juga biasa dilakukan kepada komunitas, penyandang disabilitas dan sebagainya. Hal itu menyebabkan sosialisasi politik tersebut terbagi dalam segment- segment tertentu yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang hanya berjumlah 19 orang. Tak hanya itu, pandemi yang terjadi saat ini membuat penyaluran dana dari Pemerintah Kota Cilegon khususnya untuk menjalankan sosialisasi politik itu tidak sebesar dana sebelumnya, sehingga itu juga menjadi penghambat KPU Kota Cilegon dalam sosialisasi politik kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah.

Mengingat kondisi Pandemi Covid yang sudah berangsur membaik, dan kebijakan PPKM yang akan dilonggarkan terutama pada masa pasca Pandemi Covid-19, maka peneliti pun optimis bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Cilegon dapat lebih komprehensif dan menjangkau seluruh lapisan pemilih pemula di Kota Cilegon. Mendukung hal tersebut, sejalan dengan penelitian dari Herman et al., (2021), bahwa pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa, tercatat partisipasi pemilih pemula yang dijangkau melalui sosialisasi media social dan materi sosialisasi politik yang disediakan oleh panitia pemilihan kecamatan. Selain itu, di Aceh, sosialisasi politik yang dilakukan dinilai mampu mewujudkan pemahaman dan partisipasi politik pemilih pemula dapat meningkat (Wibowo & Hasan, 2023). Di sisi lain, tercatat adanya pengaruh yang signifikan terjadi pada pembentukan pemahaman dan partisipasi politik dari pemilih pemula, yang dilakukan oleh keluarga (Wibowo &

Hasan, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Shoimah (2013) menegaskan bahwa pembentukan orientasi politik pemilih pemula dapat dilakukan oleh peran keluarga.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pelaksanaan program sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Cilegon Provinsi Banten sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Dimensi konsepsi peran menunjukkan bahwa pemilih pemula di Kota Cilegon menjadi target utama pada kegiatan sosialisasi politik. Dimensi harapan peran menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPUD Kota Cilegon bertujuan untuk membuka pikiran pemilih pemula untuk mau secara sadar menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pemilu. Dimensi pelaksanaan peran ditunjukkan oleh sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPUD Kota Cilegon belum merata kepada para pemilih pemula. Apabila ada, sosialisasi hanya terpusat pada Kecamatan Cilegon dimana merupakan tempat kantor KPU Kota Cilegon.

Saran

Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Cilegon sebaiknya dilakukan juga secara tatap muka, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jaga jarak aman karena mengingat kebijakan PPKM di Kota Cilegon sudah menurun dan sekolah-sekolah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka dengan presentase 50 %. Selain program sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPUD, perlu adanya suatu materi pembelajaran yang disampaikan di kelas mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tiap setahun sebelum Pilkada dilaksanakan sehingga

dapat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (1982). *Psikologi Sosial*. PT. Bina Ilmu.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik "Antara Pemahaman dan Realitas"*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hayati, S. (2021). *KPU Kota Cilegon mulai lakukan persiapan Pemilu 2024*. ANTARA. <https://jambi.antaranews.com/rilis-pers/2186474/kpu-kota-cilegon-mulai-lakukan-persiapan-pemilu-2024>
- Hemas, M. A. (2015). *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal* [Universitas Negeri Semarang]. <https://lib.unnes.ac.id/33946/1/3301413042maria.pdf>
- Herman, S., Malik, I., & Sari, R. (2021). Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/5411>
- Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publication.
- Rismawati, R., & Mardiana, M. (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa. *Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jed/article/view/1939/1543>
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Ghalia Indonesia.
- Shoimah, I. (2013). *Peran Keluarga Sebagai Agen Sosialisasi Politik Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Di Kabupaten Indramayu* [Universitas Negeri Semarang]. <https://lib.unnes.ac.id/19979/1/3301409056.pdf>
- Sitepu, A. (2012). *Teori-teori Politik*. Graha Ilmu.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grafindo.
- Sutarto. (2009). *Dasar-dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press.
- Wibowo, M. T., & Hasan, E. (2023). Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata B. Aceh); Political Socialization For Voters In The Family Environment (Case Study Kecamatan Lueng Bata B. Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP(JIMFISIP)*, 8(2). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/3061>